

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, atau badan hukum yang melanggar aturan hukum. Yang jelas dari perbuatan melanggar aturan hukum maka bagi pelaku akan dikenai sanksi pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Simon, *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku, tindakan yang melanggar suatu huku serta dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Simon membagi ke dalam 2 (dua) unsur yaitu, pertama unsur objektif yang berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang/diperbolehkan, akibat masalah tertentu. Kedua unsur subjektif yaitu berupa kesalahan (*schuld*) serta kemampuan bertanggungjawab oleh pelaku.¹

Van Hammel, *Strafbaar feit* menurut Van Hammel sama rumusan Simon, hanya saja ditambah dengan tindakan mana yang sifatnya dapat dipidana.²

VOS, *Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan oleh peraturan yang berlaku atau undang-undang diancam dengan pidana.³

Hal 69 ¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,

² Ibid.

³ Ibid.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana terdapat dua unsur yaitu objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan seseorang, akibat perbuatan itu, dan unsur subjektif adalah adanya seseorang (pelaku) yang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, disertai dengan adanya kesalahan. Perbuatan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan adanya kesalahan. Hal tersebut dapat berhubungan berhubungan dengan akibat dari perbuatan serta dalam keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan⁴

Dapat dikatakan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Subjek
- b. Adanya perbuatan melawan hukum
- c. Adanya kesalahan yang dilakukan seseorang
- d. Perbuatan yang dilakukan dilarang oleh aturan yang berlaku dan dapat diancam pidana terhadap pelaku
- e. Adanya tempat dan waktu perbuatan melawan hukum itu dilakukan
- f. Serta adanya keadaan bagaimana perbuatan itu dilakukan

Suatu perbuatan tindak pidana ini sebagai mana telah dijelaskan diatas haruslah memenuhi unsur dari tindak pidana, yang mana pertama adalah unsur objektif yaitu adanya perbuatan dari seseorang disertai dengan akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, dan serta dalam melihat suatu perbuatan tindak pidana haruslah melihat keadaan apa pelaku melakukan perbuatan melawan hukum. Serta berdasarkan unsur subjektif, suatu perbuatan tindak pidana akan dapat dikatakan tindak pidana jika adanya

⁴ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, kencana Prenamedia Group, Jakarta:2014 hal 39-40

orang yang mampu bertanggung jawab dengan kata lain dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dalam unsur subjektif disebutkan adanya kesalahan (*Dollus* atau *Culpa*) yang dilakukan seseorang.

4. Jenis Tindak Pidana

a) Kejahatan dan pelanggaran

Dalam *Encyclopedia Americana* (Volume 8, dikutip dari M. Arif Amrullah) dikemukakan, kejahatan atau *crimes* adalah perbuatan yang secara hukum dilarang oleh negara. Dilihat dari segi hukum (*legal definition*), kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan hukuman atau dikenai sanksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sedangkan pelanggaran perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik, perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi.⁶

b) Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

Delik formal adalah rumusan ketentuan pidana yang bila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku delik dan karenanya harus dihukum. Sedangkan delik materiel adalah delik yang di dalam rumusannya terkandung hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat.⁷

⁵ M. Arif Amrullah, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta, Prenamedia Group, Hal 8

⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm 117-118, William L. Barnes Jr, "Revenge on Utilitarianism: Renouncing A Comprehensive Economics Theory of Crime and Punishment", *Indiana Law Journal*, Vol. 74, No. 627, 1999, hlm 17.

⁷ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Hal 367

c) Perbuatan pidana atau delik *Commisionis*, *Ommisionis*, dan

Commisionis Perommisionen Commisa :⁸

1. Perbuatan ppidana atau delik *Commisionis* adalah perbuatan pidana berupa pelanggaran terhadap larangan, dengan kata lain adalah perbuatan yang dilarang, yaitu seperti contoh pencurian, penggelapan, dan penipuan
 2. Perbuatan pidana atau delik *ommisionis* adalah perbuatan pelanggaran terhadap perintah, contoh tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, seperti : tidak meghadap sebagai saksi di muka pengadilan yang tercantum dalam Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tidak memberikan pertolongan terhadap orang yang diketahui memerlukan suatu pertolongan hal itu tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 3. Perbuatan pidana *Commisionis per Ommisionen Commisa* adalah perbuatan yang berupa melanggar suatu larangan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak melakukan suatu perbuatan. Contoh, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberikan air susu kepada anaknya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.
- d) Delik (perbuatan pidana) *Dolus* dan delik *Culpa*, yang dimaksud dengan delik *dolus* adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, sedangkan delik *culpa* adalah suatu perbuatan pidana yan dilakukan dikarenakan kelalaian oleh pelaku.
- e) Delik tunggal dan delik berangkai, delik tunggal merupakan suatu perbuatan pidana dapat dikatakan tindak pidana hanya dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berangkai dapat dikatakan perbuatan pidana jika dilakukan beberapa kali atau perbuatan tersebut dijadikan kebiasaan.
- f) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

⁸ Ismu Gunadi, Op. Cit, Hal 46

- g) Delik aduan dan delik umum, delik aduan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dalam penuntutannya akan dilakukan jika ada pengaduan dari pihak korban atau penuntutan terhadap pelaku akan dilaksanakan jika terhadap perbuatannya ada pengaduan dari pihak korban. Sedangkan delik umum penuntutannya akan dilakukan saat setelah diketahui perbuatan pidana tersebut telah dilakukan oleh pelaku tanpa menunggu adanya pengaduan dari korban terlebih dahulu.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Tindak Pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan atau kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, atau badan hukum yang melanggar aturan hukum. Yang jelas dari perbuatan melanggar aturan hukum maka bagi pelaku akan dikenai sanksi pidana.

Sedangkan tindak pidana Narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisir maupun tidak terorganisir, yang dalam perbuatannya tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, mengedarkan, dan menyalahgunakan Narkotika dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pengertian Narkotika Menurut Para Ahli

Menurut Yusof et al. sebagaimana dikutip oleh Wahyuni Ismail, bahwa narkoba (*drug*) memiliki beberapa pengertian, contoh dalam dunia farmasi dan kedokteran “ *drug* ” memiliki arti obat, narkoba dan obat secara umum memiliki maksud yang sama yaitu sejenis bahan- bahan kimia baik itu alamiah maupun buatan atau sintesis, apabila dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntikkan, hirup, hisap, ataupun dimakan yang dapat merubah fungsi tubuh atau badan dalam segi fisik maupun mental.⁹

Menurut Taib sebagaimana dikutip oleh Wahyuni Ismail, memberikan arti narkoba sebagai bahan-bahan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jasmani maupun rohani serta menimbulkan ketagihan. George memberikan pernyataan bahwa narkoba adalah zat kimia yang dalam penggunaannya atau pemakaiannya bukan untuk tujuan pengobatan merupakan perbuatan yang dilarang, dikarenakan dapat menimbulkan atau menyebabkan ketergantungan secara fisik maupun psikologis.¹⁰

Menurut Kuntari sebagaimana dikutip oleh Wahyuni Ismail, memberikan penjelasan bahwa penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai kegiatan pemakaian obat-obatan yang dilakukan secara terus-menerus, maupun sekali-kali namun dengan cara melebihi dosis dan tidak sesuai atau tidak menurut resep dokter. Definisi tersebut sesuai dengan definisi Departemen Sosial yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan bahan yang dilakukan oleh seseorang atau individu bukan untuk tujuan pengobatan atau di luar tujuan pengobatan.¹¹

Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dikalangan masyarakat ini menyebabkan gangguan sosial, serta juga berpengaruh kepada orang lain, dalam hal ini untuk membentuk karakter anak sejak dini adalah suatu keperluan yang sangat penting dan dalam hal ini lingkungan sangat berpengaruh untuk kepentingan pertumbuhan, dan pembentukan diri seorang anak. Dapat diketahui bahwa pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk bagi masyarakat.

⁹ Wahyuni Ismail, *Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba*, <http://journal.uin-alauddin.ac.id>. Acces 11- 04 - 2018

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wahyuni Ismail. Ibid.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Berikut jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang tercantum dan diatur di dalam UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika : ¹²

- a. Pasal 111 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*” ; dan dalam Pasal 112 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;
- b. Pasal 113 menyebutkan “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I*” ;
- c. Pasal 114 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” ;
- d. Pasal 115 menyebutkan “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*” .
- e. Pasal 116 menyebutkan “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain*” .
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
- g. Pasal 118 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II*” ;
- h. Pasal 119 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II*” ;
- i. Pasal 120 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II*” ;
- j. Pasal 121 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain*” ;

¹² Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 90

- k. Pasal 122 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III* “ ;
- l. Pasal 123 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III* “ ;
- m. Pasal 124 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III* “ ;
- n. Pasal 125 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III* “ ;
- o. Pasal 126 “ *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain* “ ;
- p. Pasal 127 “ *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri* “; Pasal 128 “ *Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor* “ ;
- q. Pasal 129 “ *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika* “;
- r. Pasal 131 “ *Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika* “;
- s. Pasal 132 “ *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika* “;
- t. Pasal 133 “ *Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika* “;
- u. Pasal 134 “ *Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut* “.

Berdasarkan penjelasan jenis tindak pidana narkoba dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terbagi kedalam beberapa jenis yaitu :

- a) tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;
- b) memproduksi, mengimpor, mengekspor, serta menyalurkan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum;
- c) melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- d) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- e) menggunakan Narkotika secara tanpa hak (tidak memiliki izin) atau melawan hukum;
- f) memiliki narkoba, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;
- g) seseorang menyuruh, memberi atau memberikan janji terhadap sesuatu hal, memberi kesempatan, memberikan anjuran, memberikan suatu kemudahan, melakukan paksaan disertai ancaman, melakukan pemaksaan disertai kekerasan,

melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

h) melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

i) pecandu narkotika yang telah cukup umur atau dewasa dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; keluarga pecandu narkotika dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwenang;

j) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika;

4. Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika

Peredaran Narkotika sebagaimana tertulis dalam Pasal 35 BAB VI Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai Peredaran dijelaskan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini peredaran narkotika dilakukan oleh orang-orang atau sekelompok orang diedarkan tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang, yang pada dasarnya untuk melakukan pengedaran narkotika ini haruslah mendapat izin terlebih dahulu.

Sedangkan penyalahgunaan narkotika ini adalah pemanfaatan atau penggunaan narkotika tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana disebutkan diatas pada dasarnya penggunaan narkotika ini untuk kepentingan kesehatan (Pengobatan) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

teori *stage of substance use* sebagaimana dikutip oleh Kurniawan Rahmadika, seseorang yang memakai atau menyalahgunakan narkoba disebabkan oleh pengaruh sosial, gaya hidup, kebiasaan, serta setelah pemakaian akan menyebabkan ketergantungan.¹³

1. Shabu- shabu

Sabu (methamphetamine) adalah zat metilamfetamin (turunan amfetamin) dimana namanya meminjam sebuah nama masakan dari Jepang, sabu berbentuk Kristal putih mirip vetsin dan tidak berbau. Cara penggunaan dibakar dengan menggunakan aluminium foil dan asapnya dihisap, atau biasanya juga dibakar dengan menggunakan botol kaca yang dirancang khusus, yang dikenal dengan boong. Sabu termasuk jenis narkotika yang mempunyai efek *stimulant* (merangsang sistem saraf pusat), diketahui bahwa dampak sabu lebih kuat dan lebih cepat reaksinya dari pada ekstasi. Pemakai jadi lebih bersemangat, peraya diri dan keberaniannya meningkat, senang ngerocos, namun pemakai amat curiga berlebihan pada semua orang dilingkungannya, akibatnya malah mengganggu kehidupan sendiri. Pengguna sabu jika berkelanjutan akan menjebol tubuh pemakainya sendiri hingga meninggal dunia. Setidaknya ada 2 jenis *Methamphetamine* yang sering ditemukan di jalanan :¹⁴

- a. MDMA (*Methle Dioxy Methamphetamine*) yang kita kenal sebagai ekstasi
- b. *Methamphetamine Ice*. Yang kita kenal sebagai SS

¹³ Kurniawan Rahmadika, *Penyalahgunaan Narkoba Pada Warga Binaan Di Rutan Klas I A Surakarta*, <http://eprints.ums.ac.id>, Hal 4-5 Acces 11 Desember 2018

¹⁴ Awet Sandi. SKM, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press Bandung, Hal 14-15

Shabu adalah nama slank dari salah satu obat yang sering dipakai para *druggist*. Shabu termasuk ke dalam stimulant sistem saraf, dengan nama kimia *metamphetamine hidroklorida* yaitu turunan dari senyawa stimulansyaraf amfetamin.¹⁵

Reaksi Euforia yang lebih hebat dari amfetamin, merasa gembira berlebihan, hilangnya rasa duka, hilangnya kesal, hilangnya malu, hilangnya lapar, hilangnya kantuk, hilangnya capek, badan terasa segar fit, dan enerjik. Efek negative : paranoid, ketakutan, sulit konsentrasi, dan ketagihan. Narkoba ini sering dipakai oleh para seniman, pelawak, penyanyi, pelukis, dan lain-lain. shabu juga banyak dipakai oleh para eksekutif, professional, mahasiswa, pelajar, dan ibu-ibu untuk menambah rasa percaya diri dan meningkatkan kinerja seketika (instan).¹⁶

Overdosis Gelisah, ketakutan, badan terasa seperti terbakar, kepala pusing, leher seperti dicekik, dada sakit, jantung berdebar, napas sesak, kejang, pupil lebar, eneg, muntah, sekarat, mati. Sakaw Bila kebiasaan menginsumsi shabu dihentikan, akan timbul reaksi putus zat, yaitu perasaan rendah diri, sangat sedih, hampa sepi, mali, ngantuk, lemah, badan dingin, pupil mengecil, tekanan darah menurun, pingsan, putus asa, bunuh diri.¹⁷

C. Teori Penyebab Kejahatan Serta Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

1. Teori Sebab Kejahatan

a. Teori Lingkungan

A. Lacassagne, didalam teori penyebab terjadinya suatu kejahatan yang mendasarkan pada pemikiran bahwa “ dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori ini adalah reaksi atas teori antropologi dan menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹⁸

b. Teori kontrol sosial

¹⁵ Zullies Ikawati, *Cerdas Mengenali Obat*, Kanisius, 2010, Yogyakarta, hal 98

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Subagyo Partodiharjo, *Ibid.*

¹⁸ Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaa Narkotika*, Yogyakarta CV Budi Utama, 2017 hal. 43.

Reiss menyatakan bahwa control sosial terbagi menjadi 3 (tiga) komponen yakni kurang kontrol internal sejak masih anak-anak, hilangnya kontrol internal dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma. Terdapat dua jenis kontrol yakni. Pertama personal kontrol (internal control) adalah kemampuan menahan diri seseorang untuk tidak menggapai kebutuhannya dengan cara melanggar aturan atau norma yan berlaku dalam masyarakat. kedua kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial untuk melaksanakan norma-norma atau hukum (peraturan) menjadi efektif.¹⁹

c. Teori spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian serta keagamaan, dikarenakan sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oeh karena itu semakin jauh hubungan seseorang dengan agama maka semakin besar kemungkinan seseorang melakukan kejahatan serta sebaliknya.²⁰

d. Teori multi faktor

Penyebab terjadinya kejahatan menurut teori ini adalah terjadinya kejahatan tidaklah ditentukan hanya dari dua teori namun dapat melebihi dari dua teori.²¹

2. Upaya Pecegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu fenomena sosial, yang tumbuh dan terkait dengan fenomena kemasyarakatan, hal ini disebut dengan *socio political problem*. Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat

¹⁹ Romli Atmasasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, halm 32 dalam Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaa Narkotika*, Yogyakarta CV Budi Utama, 2017, hal 43-44

²⁰ Irwan Jasa Tarigan, Op. Cit. hal 44

²¹ Ibid.

dilakukan dengan cara hukum pidana (*penal policy*) dan dengan cara diluar hukum pidana (*non penal policy*)²²

Beberapa teori upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Represif
Represif (*Penal Policy*) tindakan ini dillakukan saat setelah tindak pidana itu terjadi, *penal policy* disini diidentikkan dengan hukum pidana dimana teori ini sebagai upaya penaggulangan kejahatan setelah kejahatan itu sendiri telah terjadi.²³
- b. Upaya Preventif
Sedangkan upaya preventif (*non penal policy*) tindakan penanggulangan atau pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. *Non penal policy* sendiri adalah upaya penanggulangan kejahatan manakala kejahatan belum dilakukan jadi dalam hal ini *non penal policy* ini bersifat mencegah.²⁴

Peneliti akan menggunakan teori-teori yang sudah diuraikan diatas sebagai acuan peneliti menganalisa temuan-temuan setelah peneliti melakukan observasi.

²² Barda Nawawi arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 6

²³ Fedri Rizki Ramadan, *Analisis Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika di kalangan Mahasiswa*, <https://jurnal.fh.unila.ac.id>. Acces 3 Maret 2019

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal 13